

KECAMATAN BONTOSIKUYU



Laporan Keuangan
PER 31 DESEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita.

Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, partisipatif, dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan demi terwujudnya ” Good Governance” .

Dalam menyajikan laporan keuangan ini, entitas akuntansi dalam hal ini Kantor Camat Bontosikuyu menyusun sesuai tahapan / proses akuntansi penyusunan laporan keuangan, dimulai dari jurnal umum, dan diklasifikasikan dalam buku besar.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini.

Pariangan. 31 Desember 2022
CAMAT BONTOSIKUYU

Drs. MUHAMMAD ARIS
PANGKAT : Pembina Tk.I, IV/b
N I P : 19671029 199512 1 002

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal.
	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Pernyataan Tanggungjawab	iv
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	1
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	2
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	4
	2.1 Ekonomi makro	4
	2.2 Kebijakan Keuangan	4
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD	4
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	5
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	5
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	6
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	7
	4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah	7
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	7
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	7
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam stándar akuntansi pemerintahan	23
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	
	Laporan Keuangan	24
	5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan	26
	5.1.1. Pendapatan	26
	5.1.2. Belanja	27
	5.1.3. Aset	28
	<i>Laporan Keuangan Kantor Camat Bontosikuyu per 31 Desember 2022</i>	ii

5.1.4. Kewajiban	29
5.1.5. Ekuitas	31
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.	32
Bab VI Penjelasan atas informasi –informasi non keuangan	33
Bab VII Penutup	35
Lampiran- lampiran	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT BONTOSIKUYU

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Camat Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pariangan, 3 Januari 2023

CAMAT BOTNSIKUYU ,

Drs. MUHHAMD ARIS

PANGKAT : Pembina TkI,IV/b

N I P : 19671029 199512 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Bontosikuyu Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- 1.1.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Bontosikuyu
- 1.2.Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Bontosikuyu
- 1.3.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan Keuangan Kantor Camat Bontosikuyu
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- 2.1.Ekonomi Makro
Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.
- 2.2.Kebijakan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
- 2.3.Indikator pencapaian target kinerja APBD
Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan dan entitas akuntansi keuangan daerah

Memuat informasi tentang laporan Kantor Camat Bontosikuyu. sebagai entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat Informasi tentang Basis Pengukuran atas Pos-pos Pendapatan dan Belanja pada Laporan Keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari

Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2021 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah

5.1.3 Aset

Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

5.1.4 Kewajiban

Merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.1.5 Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat Uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Kantor Camat Bontosikuyu

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, kebijakan umum anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rencana strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2022, khususnya di bidang keuangan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sesuai RKPD adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana;
3. Tercapainya peningkatan relasasi fisik dan keuangan Tahun 2022
4. Percepatan pengesahan APBD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada tahun anggaran 2022, Kantor Camat Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai program strategis berupa Peningkatan Kinerja Staf Camat Bontosikuyu untuk tercapainya sesuai target yang ditetapkan. Ini bisa dilihat secara substansi tujuan program dapat tercapai yaitu. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022..

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2022 Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelolah pendapatan

B. Belanja Operasi

Belanja operasi Kantor Camat Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.2=1.877.818,136,-dan terealisasi sebesar Rp.1.816.227,555- atau 97,48 .% dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.356.556.000.-dan terealisasi sebesar Rp. 1.303.501.994. atau 99,62 %
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 500.792.724.000 dan terealisasi sebesar Rp. 512.725.561 atau 98,90 %

c .Belanja Hibah

Belanja Hibah Kantor Camat Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 20.558.412,- dan terealisasi Rp. 20.558.412,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Kantor Camat Bontosikuyu.merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 10.619.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.614.000 atau 99,95 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program

Program perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Daerah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.795.000 atau 99.98% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.750.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.500.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 669.000,- dan terealisasi sebesar Rp.669.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 4.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.400.000 atau 100% dari alokasi anggaran
- Program dan Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah** bertujuan untuk pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan alokasi anggaran Rp 4.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.440.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran dengan Sub Kegiatan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan output

terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan yang akurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.400.000,00 dengan terealisasi sebesar Rp. 4.400.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

Program dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertujuan untuk peningkatan penyediaan peraturan perundang undangan dengan alokasi anggaran Rp. 79.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.672.000- atau 98.32 % dari Alokasi anggaran

1. Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan output terpenuhinya bahan bacaan dengan alokasi Anggaran Rp 7.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.380.000,-atau 82,86 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Output kegiatan terlaksana konsultasi dan kelancaran tugas tugas SKPD dengan alokasi anggaran Rp 71.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 71.292. 000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk terlaksananya urusan pemerintahan di kecamatan bontosikuyu dengan alokasi anggaran Rp. 278.898.136,- dan terealisasi sebesar Rp.272.306.881- atau 97.64 % dari Alokasi anggaran

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan output terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air dan

listrik dengan alokasi anggaran Rp 12.452.924,- dan terealisasi sebesar Rp 7.651.609,- atau 61,44 % dari alokasi anggaran.

2. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan kantor dengan output terpenuhinya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp 266.445.212,- dan terealisasi sebesar Rp 264.655.612,- atau 99,33 % dari alokasi anggaran.

Kegitana pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah bertujuan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.902.880,- atau 99,17 % dari alokasi anggaran.

- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan output kegiatan tersedianya biaya pemeliharaan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69.902.880 atau 99 % dari alokasi anggaran.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMETINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.985.000,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Output terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.985.000,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah** yang ada di Kecamatan alokasi anggaran sebesar Rp 4.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.910.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan dengan Output terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.910.000,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp . 15.280.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forim Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektipitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan alokasi anggaran sebesar Rp 5.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.280.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
-

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.865.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.865.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi Pertikal di Wilayah kecamatan dengan output kegiatan terlaksananya ketentraman dan ketertiban dan alokasi anggaran sebesar Rp 11.865.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.865.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

4. PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemeintahan Umum Seuai dengan penugasan kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapknan Pengamalan pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhinekan Tinggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

-
-

5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA

Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.790.000,- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.950.000,- atau 98.99% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.800.000,- atau 98.99% dari alokasi anggaran.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA

Program ini dilaksanakan melalui 5 (Lima) Kegiatan dan 12 (Dua belas) Sub Kegiatan utama sebagai berikut :

Tabel.3.4.1. Daftar Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten / Kota :

NO.	KEGIATAN / Sub Kegiatan	KET.
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	99, 95%
	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
2	Adminustrasi Umum Perangkat daerah	98,32 %
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	97.64 %
4	Pemerintahan daerah	
5	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerinataan daerah	99.17 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan Prigam ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	1.800.0000	1.795.000	Rupiah
Output	Jumlah	5 Dokumen	5 Dokumen	bulan
Outcome	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dengan baik	100	100	%

Dengan adanya kegiatan diatas, maka pelaksanaan Pendidikan dan Latihan dapat terlaksana dengan dengan Anggaran Rp. 1.800000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.795.000- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

2. Kegiatan Adminsitration Keuangan Perangkat daerah

kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) Sub kegiatan utama sebagai berikut :

abel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program perencanaan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO.	Sub KEGIATAN	KET.
1.	Koordinasi dan Penyusunan laporan RKA-SKPD	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.400.000	4.400.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1Dokumen	bulan
Outcome	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100	100	%

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	1.500,000	1.500.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1Dokumen	bulan
Outcome	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	100	100	%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtusar realisasi Kineja SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.400.000	4.400.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokume n	Bulan
Outcome	Tersedianya Penysunan Laporan Capaian Kineja SKPD	100	100	%

Dengan adanya kegiatan diatas, Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD dan di ketahuan kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran Rp. 4.400.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 4.400.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program administrasi keuangan perangkat daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.150.000	4.150.000	Rupiah
Output	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Bulan
Outcome	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	100	100	%

Dengan adanya kegiatan diatas, koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran Rp. 4.150.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 4.150.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program administrasi umum Perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	80,25 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.700.000	6.382.000	Rupiah
Output	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1Paket	paket	Tahun
Outcome	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tepat waktu	100	98,32	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 7.700.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.382.000 atau 98,32 %.

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program administrasi umum Perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,99 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	71.300.000	71.292.000	Rupiah
Output	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	1 Kegiatan	1Kegiatan	12 Bulan
Outcome	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	99,99	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 71.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 91.292.000,- atau 99.99 % dari alokasi anggaran.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui (Satu) Sub kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	61.44%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	12.452.924	7.651.069	Rupiah
Output	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Tahun
Outcome	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100	61.44	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp .12.452.924.- dan terealisasi sebesar Rp. 7651.069 atau 61.44 % dari alokasi anggaran.

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	99,33%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	266.445.212	264.655.612	Rupiah
Output	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Tahun
Outcome	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	99,92	99,33	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 266.455.212,- dan terealisasi sebesar Rp 264.655.612 atau 99,33 % dari alokasi anggaran.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	99,17%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	70.490.000	69.902.880	Rupiah
Output	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	8 unit	8 unit	Tahun
Outcome	Terlaksananya peningkatan kualitas tugas tugas pemerintahan	100	99,17	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp,70.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp 69902.880 atau 99,17% dari alokasi anggaran.

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Program ini dilaksanakan melalui 2 (Satu) kegiatan Dan satu Sub Kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut

Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.000.000	10.000.000	Rupiah
Output	Terbinanya karakter dan akhlak masyarakat	1	1	Kegiatan
Outcome	Terwujudnya pemahaman terhadap nilai nilai keagamaan bagi masyarakat	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000 atau 100 % dari alokasi anggaran.

2 Kegiatan Penyelenggaraan Umum Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) Sub kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program koordinasi upaya Penyelenggraan umum pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Tingkat kecamatan .

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Fasiliatsi Percepatan Standar pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.910.000	4.910000	Rupiah
Output	Terlaksananya pelayanan Publik	1	1	Dokumen
Outcome	Tercapainya target Penyusunan SOP kecamatan bontosikuyu	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 4.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.910.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan Dan Sub Kegiatan utama sbb :

1, Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forim Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.000.000	10.000.000	Rupiah
Output	Terlaksananya Musyawarah perencanaan desa	1	1	Kegiatan
Outcome	Terwujudnya perencanaan desa dan Kecamatan Yang baik	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Perencanaan Pembangunan dapat terlaksana setiap tahun dengan Anggaran sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000 atau 100 % dari alokasi anggaran.

2, Sub Kegiatan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penyelenggaraan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa.

NO.	SUB KEGIATAN	KET.
1.	Peningkatan Efektipitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Peningkatan Efektipitas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.000.000,-	5.000.0000	Rupiah
Output	Terlaksananya kegiatan Asistensi APB Desa	1	1	Paket
Outcome	Terwujudnya Pelaksanaan APB Desa	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Fasilitasi pelaksanaan APB Desa dapat terlaksana sesuai Perencanaan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000, atau 100 % dari alokasi anggaran.

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan utama sbb :

Tabel.3.4.2. Daftar Kegiatan pada Program penataan organisasi.

NO.	KEGIATAN	KET.
1.	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tinggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Terlaksananya Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tinggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	11.865.000.	11.865.000	Rupiah
Output	Terlaksananya kegiatan Penanggulangan COVID 19	1	1	Tahun
Outcome	Terwujudnya Pelaksanan Vaksinasi bagi Masyarakat	100	100	%

Dari tabel diatas menunjukkan kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana di ketahui kemajuan dan keberhasilan SKPD dengan Anggaran sebesar Rp 11.865.000 dan terealisasi sebesar Rp 11.865.000,- atau 100 % dari alokasi ang

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dilaksanakan melalui 1 KEGIATAN) kegiatan DAN Satu Sub Kegiatan utama sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Tabel.3.4.5. Daftar Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO.	Sub KEGIATAN	KET.
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhinekan Tinggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI.	100%

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diuraikan, sebagai berikut :

Terlaksananya Peringatan HUT RI Dan hari Jadi Selayar				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	20.000.000	2.0000.000	Rupiah
Output	Terwujudnya Peringatan Hari Besar Nasional	2	2	Kegiatan
Outcome	Terlaksananya Peringatan HUT RI dan hari jadi Selayar	100	100	%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan DAN Dua Sub Kegiatan utama sebagai berikut :

Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel.3.4.11. Daftar Kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	SUB KEGIATAN	KET.
1.	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %

Adapun capaian keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan di atas, dapat diuraikan, sebagai berikut:

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.000.000	10.000.000	Rupiah
Output	Terselenggaranya Pemberdayaan desa	1	1	Laporan
Outcome	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat	1	1	Paket

Dengan adanya kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu dapat memperoleh Bantuan.

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.800.000	15.800.000	Rupiah
Output	Tersedianya Laporan APB Dea	12	12	Desa
Outcome	Tersedianya Dokumen APB Desa	12	12	Dokumen

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi Keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahun anggaran 2022, entitas pelaporan adalah Pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Kantor Camat Bontosikuyu

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- e. persediaan;
- f. investasi jangka panjang;
- g. asset tetap;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang;
- j. ekuitas.

Aset Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

1.1 Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

1.4 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset lainnya merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Pengukuran Aset tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan

atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah

dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan

jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan Ekuitas.

POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan *netto*; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah. .

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja barang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggotamasyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiri atas :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Geung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Kantor Camat Bontosikuyu untuk tahun Anggaran 2021 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan **Rp** **0**

Dalam tahun Anggaran 2022 Kantor Kecamatan Bontosikuyu tidak mengelolah pendapatan.

No	Uraian	Jumlah	
		TA. 2021	TA. 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 0	Rp 0
2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 0	Rp 0
3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 0	Rp 0
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 0	Rp 0
	Jumlah	Rp 0	Rp 0

5.1.2. Belanja

5.1.2.1. Belanja Pegawai **Rp** **1.356.556.000**

Belanja pegawai di atas merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2020. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2020	TA. 2022
A	BELANJA PEGAWAI	1.622.562.000	1.336.556.00
1	Gaji Pokok	1.189.062.000	1764.000.000
2	Tunjangan PNS	433.500.000	401.036.000
3	Tambahan Penghasilan PNS	0	191.520.000
4	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	0
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0
7	Uang Lembur		
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	3.652.056.000	1.336.556.00

5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa**Rp****522.262.136**

Belanja Barang dan Jasa di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2020	TA. 2021
1	Belanja Bahan Habis Pakai	258.915.000	299.880.136
2	Belanja Bahan / Material	0	0
3	Belanja Jasa Kantor	-	-
4	Belanja Pihak ke Tiga	0	0
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.550.000	70.490.000
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.964.000	11.964.000
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0	0
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0
9	Belanja Sewa Alat Berat	0	0
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0
11	Belanja Makanan dan Minuman rapat	67.628.0000	67.628.0000
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0
13	Belanja Pakaian Kerja	0	0
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0	0
15	Belanja Perjalanan Dinas	116.855.000	71..300.000
16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0
17	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0
18	Belanja Pemeliharaan kantor dan Rujab	0	0
19	Belanja Jasa Konsultasi	0	0
20	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0
21	Belanja Barang untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0
22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0
23	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0
24	Belanja Honorarium Non Pegawai	0	0
25	Honorarium PNS	0	0
26	Honorarium Non PNS	0	0
27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0
	JUMLAH	517.300.000	521.262..136

5.1.2.3. Belanja Modal**Rp****0**

Belanja Modal di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2021	TA. 2022
2.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0	0
2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian	0	0
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan	0	0
4	Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran	0	0
5	Belanja Modal Pengadaan Hutan	0	0
6	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan	0	0
7	Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa	0	0
8	Belanja Modal Pengadaan Tandus/Rusak	0	0
9	Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang2 dan Padang Rumput	0	0
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	0	0
11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	0
12	Belanja Modal Pengadaan Pertambangan	0	0
13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Bukan Gedung	0	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000	
1	Belanja Modal Pengadaan Lemari Kaca Dorong		
2	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu		
3	Belanja Modal Pengadaan Meja 1 Biro activ		
4	Belanja Modal Pengadaaa Lapotop	40.000.00	
	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin		
6	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding		
7	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat		
8	Belanja Modal Pengadaan LCD		
9	Belanja Modal Pengadaan Hardisk		
10	Belanja Modal Pengadaan Power		
11	Belanja Modal Pengadaan Mic		
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan		
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor		

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2021	TA. 2022
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	
16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	
17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0	
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0	
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemancar	0	
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	0	
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	0	
23	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	0	
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	
25	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	
26	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab.Fisika Nuklir/Elektronika	0	
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0	
28	Belanja Modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0	
29	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab.Lingkungan Hidup	0	
30	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	
31	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api	0	
32	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0	
33	Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar	0	
34	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0	
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	
3	Belanja Modal Pembangunan TemoatParkir	30.000.0000	
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersenjata	0	
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0	
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi	0	
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Manumen/Bersejarah Lainnya	0	
8	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0	
9	Belanja Modal Pengadaan Bangunan TuguTitik Kontrol/Pasti	0	
10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	0	
11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	0	
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	0	
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	0	
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0	

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2021	TA. 2022
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0	
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	0	
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	
8	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih /Baku	0	
9	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0	
10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	0	
11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0	
12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0	
13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0	
14	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	
15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0	
16	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0	
17	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertanahan	0	
18	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas	0	
19	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0	
20	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	
21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0	
22	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0	
23	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas	0	
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	0	
2	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	0	
3	Belanja Modal Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	0	
4	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	
6	Belanja Modal Pengadaan Hewan	0	
7	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	0	
8	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0	
	JUMLAH	70.0000`0000	

5.2.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET

5.2.1.1 ASET LANCAR

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 120.000.

Merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2022 tidak dibelanjakan dan/atau masih di bendahara pengeluaran/belum disetor ke kas daerah yang terdiri dari Sisa UUDP 2022 sebesar Rp.120.000

5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0

Merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2022 masih berada di bendahara penerimaan dan belum disetor ke kas daerah sebesar Rp. 0

5.2.1.1.3 Piutang Retribusi Rp 0

Merupakan piutang retribusi.Rp.0 per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0 disebabkan karena telah terbit SKRD namun sampai dengan 31 Desember 2019belum dibayar oleh wajib retribusi.

NO	URAIAN	SALDO 31 DES '21	MUTASI		SALDO 31 DES' 22
			DEBET	KREDIT	
1	Piutang Retribusi.....	0	0	0	
2					
	J u m l a h	0	0	0	

BaBagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian per 31 Desember 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0Bagian Lancar TP/TGR merupakan .0 Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut :

5.2.1.1.4 Bagian Lancar Tuntutan Rp 0,00
Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	SALDO 31 DES '14	MUTASI		SALDO 31 DES'15
			DEBET	KREDIT	
1	Bagian Lancar TP/TGR.....				
2					
	J u m l a h				

5.1.3.1.6 Piutang Lainnya Rp 0

5.2.1.1.5 Bagian Lancar Tagihan Rp
Penjualan Angsuran

Penjualan atas penjualan Pemda Selayar (DUM) yaitu nilai yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2022 sebesar Rp....., Tagihan Penjualan Angsuran. Adapun rinciannya terdiri atas:

NO	URAIAN	SALDO 31 DES '14	MUTASI		SALDO 31 DES'22
			DEBET	KREDIT	
1	Bagian Lancar Angsuran Penjualan...	0	0	0	0
2	Bagian Lancar Angsuran Penjualan...	0	0	0	0
	J u m l a h	0	0	0	0

Piutang Lain-lain adalah akumulasi dari Piutang-Piutang milik Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar selain dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Bagian Lancar

No	URAIAN	Saldo 31-Des-21	Mutasi		Saldo 31-Des-22
			Debet	Kredit	
1	Piutang Dana Pemberdayaan Masyarakat	0			
2	Bagian Lancar Piutang Bantuan Modal kepada Koperasi Kontu Toje'	0			
3	Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi PUSKODISPAN	0			
4	Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi Desa	0			
5	Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi	0			
6	Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi				
7	Piutang Bunga Dana Bergulir UMKM				
8	Tagihan Pengembalian TKI Pimp & Anggota DPRD				
9	BPO Pimp & Anggota DPRD				
10	Piutang TP-TGR				
11	Pinjaman uang muka perumahan bagi PNS				
12	Pemberian bantuan cicilan kendaraan roda 2 bagi PNS				
13	Piutang PAD Lain-lain Yang Sah (Asbuton)				
14	Piutang CV Jasa Utama				
1) a	Total				

harus di kembalikan kepada pemda. Selama TA 2021 dikembalikan sebesar Rp.0 sehingga per 31 Desember 2022 masih tersisa Rp.0

5.1.3.1.7 Persediaan**Rp. 108.267.500**

persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Kantor Camat Bontosikuyu per 31 Desember 2021 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2021	2022
1	Alat Tulis Kantor	56.716.500	61.148.000
2	Alat Listrik	0	0
3	Bahan Bakar Minyak	40248.000	47.119.500
4	Bahan Kimia	0	0
5	Bahan / Bibit Tanaman	0	0
6	Obat-obatan	0	0
7	Perangko dan Materai	0	0
8	Lainnya	0	0
	JUMLAH	96.964.5000	108.267.500

Acara *Stock Opname* terlampir.

5.1.3.1.8 Penyisihan Piutang Taek Tertagih Rp.0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan sebesar RP.0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tangga Pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			-
Bagian Lancar TPA			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih			

5.1.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.1.3.2.1 Investasi Non Permanen – Investasi Rp Dana Bergulir

Nilai Investasi Non Permanen merupakan saldo Investasi dana bergulir Pemda Selayar berdasarkan sampai dengan 31 Desember 2022 telah dikembalikan sebahagian, dengan ringkasan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SISA POKOK	PENYISIHAN	NRV
1	Pengguliran 2007			
2	Pengguliran 2008			
3	Pengguliran 2009 Tahap 1 & 3			
4	Pengguliran 2009 Tahap 2			
5	Pengguliran 2009 Tahap 4			
6	Pengguliran 2010			
7	Pengguliran 2011 Tahap 1			
8	Pengguliran 2011 Tahap 2			
9	Pengguliran 2011 Tahap 3			
TOTAL				
SALDO KAS BANK PER 1 DESEMBER 2022				
JUMLAH DANA BERGULIR				

Secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran...*

5.1.3.2.2 Investasi Permanen**Rp****0**

Nilai Penyertaan Modal (investasi) Pemda Selayar sampai dengan 31 Desember 2022 di atas merupakan penyertaan modal pemerintah daerah pada beberapa perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	Saldo 30-Sep-2022	Mutasi 2015 (Rp)	Saldo 31-Des-22
1	Penyertaan Modal di PT.Bank Sulsel	0		00
2	Penyertaan Modal di PDAM Selayar	0	0	0
3	Penyertaan Modal di PD Berdikari	0	0	0
4	Penyertaan Modal di BPR-PEMP	0	0	0
5	Penyertaan Modal di PT.SUC	0	0	0
T o t a l			0	0

5.1.3.3 ASET TETAP**5.1.3.3. Tanah****Rp****228.600,000****1**

Nilai Tanah sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Kantor Camat Bontosikuyu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des ' 21	Mutasi		Saldo 31 Des'22
			Debet	Kredit	
1	Tanah	228.600.000	-	-	228.600.000
2					
	J u m l a h	228.600.000	-	-	228.600.000

Posisi Perbandingan Tanah:

31-Des-21	31/12/2022	Kenaikan / (penurunan)
Rp 228.600.000	Rp 228.600.000	Rp -

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai **berikut**):

Saldo Awal	Rp	228.600.000
Penambahan :		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Peny. Pembangunan	Rp	-
Pengembangan	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
	Rp	-
Pengurangan		
Transfer Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
	Rp	-
Jumlah	Rp	228.600.000

Realisasi Belanja Modal Tanah dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
531111	BM Tanah	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan tanah yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan tanah yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Selisih sebesar Rp (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	Rp	0

5.1.3.3.2 Peralatan dan Mesin Rp 442.887.250

Nilai peralatan dan mesin sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Kantor Camat Bontosikuyu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des '21	Mutasi		Saldo 31 Des'22
			Debet	Kredit	
1	Alat-alat Angkutan	159.450.000		-	159.450.000
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	206.922.250		-	206.922.250
3	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	73.515.000			73.515.000
4	Alat-alat Laboratorium				
5	Alat-alat Kedokteran				
	J u m l a h	442.887.250			442.887.250

Saldo Awal	Rp	442.887.250
Penambahan :		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
	Rp	-
Pengurangan		
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban aset	Rp	-
	Rp	-
Jumlah	Rp	442.887.250

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp -
532121	BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>0</u>

Selisih sebesar Rp (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	<u>Rp</u>	<u>0</u>

5.1.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp 560.400.000

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2020 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Kantor Camat Bontosikuyu . dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo tahun 2021	Mutasi		Saldo tahun 2022
			Debet	Kredit	
1	Bangunan Gedung	534.300.000			534.300.000
2	Bangunan Monumen	26.100.000			26.100.000
	J u m l a h	560.400.000	50		560.400.000

Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan:

31-Des-20	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
Rp 560.400.000	Rp 560.400.000	Rp -

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut **Tahun 2022 sebagai berikut L**

Saldo Awal	Rp 560.400.000
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp -
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp 560.400.000

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
533111	BM Gedung dan Bangunan	Rp -
533121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Gedung dan Bangunan yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
	Rp	0
Jumlah		
Selisih sebesar Rp (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :		
1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	Rp	0

5.1.3.3.4 Jalan, Jaringan, Irigasi Rp **570.000**

Nilai Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2021 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Kantor Camat Bontosikuyu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des '21	Mutasi		Saldo 31 Des'22
			Debet	Kredit	
1	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
2	Jaringan	0	0	0	0
3	Irigasi/...dll	0	0	00	0
	J u m l a h		0	0	0

a) Posisi Perbandingan *Jalan dan Jembatan*:

31-Des-21	31-Des-22	Kenaikan / (penurunan)
Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi/perubahan Jalan dan Jembatan tersebut adalah sebagai berikut (s):

Saldo Awal	Rp -
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp -
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp -

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
534111	BM Jalan dan Jembatan	Rp -
534141	BM Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Jalan dan Jembatan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Jalan dan Jembatan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Jalan dan Jembatan yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah	Rp	0

Selisih sebesar Rp (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	<u>Rp</u>	<u>0</u>
	Rp	0

Posisi Perbandingan Irigasi:

31-Des-21	31-Des-22	Kenaikan / (penurunan)
Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi/perubahan Irigasi tersebut adalah sebagai berikut (**sesuai transaksi dalam TA.2022**):

5.1.3.3.5 Aset Tetap Lainnya **Rp**

Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Kantor Camat Bontosikuyu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des ' 21	Mutasi		Saldo 31 Des'22
			Debet	Kredit	
1	Buku	0			
2	Lukisan/Foto				
3	Barang Bercorak Seni dan Budaya				
4	Hewan ternak dan tanaman, Dll.....				
	J u m l a h				

Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya:

31-Des-21	31-Des-22	Kenaikan / (penurunan)
Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut (*sesuai transaksi 2015*):

Saldo Awal	Rp	-
Penambahan :		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Peny. Pembangunan	Rp	-
Pengembangan	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
	Rp	-
Pengurangan		
Transfer Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
	Rp	-
Jumlah	Rp	-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
536111	BM Fisik Lainnya	Rp -
536121	BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Aset Tetap Lainnya tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Aset Tetap Lainnya yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Selisih sebesar Rp (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :		
1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0

N

i
l
a
i
n
5.1.3.3.6 **Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Kantor Camat Bontosikuyu dengan rincian sebagai berikut :

A
s
e
t
l
a
i
n
n

No.	Jenis KDP	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

i
n
5.1.3.4. **ASET LAINNYA**

Aset lainnya sebesar Rp 0 saldo per 31 Desember 202 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Kantor Camat Bontosikuyu yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp -
2	Tuntutan Ganti Rugi	Rp -
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp -
4	Aset Tak Berwujud	Rp -
5	Aset Lain-Lain	Rp -
Jumlah Belanja		Rp -

5.1.3.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran Rp

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar (Rp...),
sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp...)

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Piutang PNB	Keterangan
1	xxx	Rp 1	xxx
	Total	Rp 1	

5.1.3.4.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp 0

Saldo Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember
2021 sebesar (Rp...), sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp...)

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Piutang PNB	Keterangan
1	xxx	Rp -	xxx
	Total	Rp -	

5.1.3.4.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar (Rp...),
sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp...)

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Piutang PNB	Keterangan
1	xxx	Rp 1	xxx
	Total	Rp 1	

5.1.3.4.4 Aset Tak Berwujud**Rp****0**

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar (Rp.0), sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.0.). Hal ini berarti Nilai Aset Tak Berwujud TA 2021 meningkat/menurun sebesar (Rp.0.) dibanding TA 2021

Posisi Perbandingan Aset Tak Berwujud:

31-Des-20	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Awal 2021	Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut (*sesuai transaksi dalam TA.2022*):

Saldo Awal	Rp -
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp -
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp -

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
536111	BM Fisik Lainnya	Rp -
536121	BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Aset Tak Berwujud tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Aset Tak Berwujud yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Selisih sebesar Rp (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	Rp	0

5.1.3.4.5 Aset Lain-Lain Rp

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar (Rp...), sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp...)

Aset Lain-lain terdiri dari :

1	Aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional	Rp -
2	TGR yang Penagihannya dilimpahkan	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

5.1.4 KEWAJIBAN

5.1.4.1 Utang Jangka Pendek Rp **0,00**

Utang jangka pendek terdiri dari pajak yang telah dipungut oleh bendahara SKPD yang belum disetor ke kas Negara, hutang pada PT. Askes dan hutang kepada pihak ketiga penyedia barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31/12/2021	Mutasi 2015		Saldo 31/12/2022
			Debet	Kredit	
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
2	Utang Pada Fihak Ketiga				
3	Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke desa	-			-
4	Utang Bunga	-			-
5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-			-
6	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemda Lainnya	-			-
7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang lainnya	-			-
8	Utang Jangka Pendek lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				

- a) Utang PFK merupakan pajak di bendahara pengeluaran yang sampai 31 Desember 2021 belum disetor ke kas negara,;
- b) Utang pada pihak ke tiga merupakan utang atas kegiatan fisik dan non fisik yang belum selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 belum terbayarkan sebesar Rp.
- c) Utang jangka pendek lainnya merupakan sisa dana penyesuaian dan otonomi khusus tunjangan pendidikan.

5.1.4.2 Utang Jangka Panjang Rp **0,00**

Pemerintah Kabupaten Selayar tidak memiliki hutang jangka panjang kepada pihak lain.

5.1.4 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp.0.dan Rp.0 Pendapatan tersebut terdiri dari :

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-
yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5.2.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.600.198831,-dan Rp.1.356.556.000,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS `

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Gaji			-
Beban Tunjangan-Tunjangan			-
Beban Honorarium			-
Beban Lembur			-
JUMLAH			-

5.2.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 105.250.000 dan Rp. 137.640.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2020	Th.2021	
Beban Persediaan Makan minum	49.011.000	55.650.000	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	51.829.000	70.490.000	-
Beban Persediaan Suku Cadang	4.410.000	11.500/000	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
JUMLAH	105.250.000	137.640.000	-

5.2.4 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Langganan Daya dan Jasa	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Profesi	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5.2.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.000.000	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
JUMLAH	17.000.000	0	-

5.2.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.45.000.0000,- dan Rp.71.300.000,0Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000	71.300.000	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000	0	-
JUMLAH	45.500.000	71.300,000	-

5.2.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5.2.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya

risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi social	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial untuk pemberdayaan social	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan, irigasi, jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Aset Tak Berwujud			
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			
Jumlah Beban Penyusutan	-	-	-

5.2.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-

masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	2022	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
-			
Piutang Jangka Pendek	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
-			
Piutang Jangka Panjang	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5.2.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Angkutan Darat			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Kantor			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

5.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2021	Th.2022	
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan PNBPN di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit di Jayapura. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

5.5 PEJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.5.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 desember 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

5.5.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

5.5.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp..0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah	0

5.5.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp..0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai 0

5.5.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp..0 dan R.0 Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Beban	Koreksi
Barang Pegawai	0
Beban Jasa	0
Jumlah	0

5.5.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

5.5.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 .dan R0.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Dasar hukum Pembentukan Kecamatan Bontosikuyu

Kecamatan Bontosikuyu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar nomor 09 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

b. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan peraturan daerah :

1. Peraturan Daerah no. 5 tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2019.
2. Peraturan Daerah no. 6 tahun 2018, tanggal 1 Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2019.

c. Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca

Terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa *neraca, laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.*

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2022, SKPD mengambil Kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2022 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2021 sesuai belanja tahun anggaran 2021 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2021.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Kecamatan Bontosikuyu kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2022, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2022.

d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VII

PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 ini, Kantor Camat Bontosikuyu telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.

